

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kawasan Gunung Merapi adalah sebuah kawasan yang sangat unik karena adanya interaksi yang kuat antar berbagai komponen didalamnya, yaitu sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Komponen sosial kawasan Merapi diantaranya adalah ; begitu dekat dan lekatnya hubungan antara manusia dan alam, yang ditandai dengan bebasnya masyarakat masuk keluar hutan dan padatnya permukiman penduduk yang berbatasan langsung dengan hutan Merapi. Merapi juga lekat dengan komponen ekonomi, dimana pariwisata dan aktifitas ekonomi masyarakat sangat pesat berkembang di Merapi, di Kaliurang, Selo, ataupun Kinahrejo. Kekayaan budaya dan kearifan tradisional masyarakat Merapi misalnya adalah prinsip-prinsip dasar melestarikan Merapi, seperti labuhan dan ruwatan mata air.

Komponen lingkungan Merapi sebagai sebuah kawasan terdiri atas hutan negara, hutan rakyat, sumber air, dan wilayah penyangga untuk mencegah erosi bagi kawasan di bawahnya (hilir). Komponen-komponen tersebut membentuk sebuah ekosistem Merapi yang khas serta saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain.

Sebagai sebuah kawasan konservasi Merapi mengadung arti penting bagi warga masyarakat dan pemerintahan di empat kabupaten yaitu Sleman, Magelang Klaten dan Boyolali. Sebelum tahun 2004 status perlindungan kawasan Merapi

adalah Hutan Lindung, Cagar Alam dan Hutan Wisata Alam. Oleh beberapa kalangan pemerintahan Propinsi kemudian ada keinginan untuk mengubah pola pengelolaan tersebut menjadi Taman Nasional. Berbagai pihak bereaksi atas usulan tersebut baik yang setuju maupun tidak. Konflik akan kepentingan terhadap perubahan status kawasan muncul dan yang menjadi persoalan adalah perubahan kawasan menjadi Taman Nasional.

### **1. Kilas Balik Taman Nasional**

Sejarah kawasan konservasi di Indonesia khususnya Taman Nasional (TN) tidak lepas dari *Manifesto Yellowstones*. Sejak kawasan Wasburn – Langford – Doane di tetapkan oleh Kongres amerika menjadi kawasan Taman Nasional pada tahun 1872, “*Yellowstones*” seakan menjadi sebuah pernyataan moral, ekonomi, politik dan politis yang menandai era modern, dimana sumber daya alam, baik yang berupa lahan, bentang alam, obyek-obyek budaya serta situsnya, dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Sejak saat itu, ide Taman Nasional kemudian menyebar ke Kanada pada tahun 1885, ke Selandia Baru tahun 1894, di susul Australia, Afrika selatan dan Amerika Latin pada tahun 1898.<sup>1</sup>

Sampai awal dekade 1980-an, konsep Taman Nasional sebenarnya belum begitu dikenal dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam di Indonesia. Pada awal penetapan UU No. 5 tahun 1967, kawasan-kawasan pelestarian alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa serta hutan wisata yang masih dibagi lagi menjadi taman buru dan hutan wisata.

---

<sup>1</sup> Wiratno et al, **Berkaca Di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional**, Cetakan I, Forest Press – The Gibbon Fondation Indonesia – PILI – NGO Movement, Jakarta, 20001, hal. 96

Berbagai pertemuan dan nasional dan internasional di bidang konservasi menyebabkan pengelompokan dan kriteria kawasan pelestarian alam terus berkembang. Dan ketika UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diterbitkan, kategori kawasan konservasi kemudian mengikuti aturan baru, yang terdiri ; kawasan suaka alam (KSA), yang terbagi atas cagar alam (CA) dan suaka margasatwa (SM) ; kawasan pelestarian alam (KPA) yang taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), dan taman hutan raya (THR). Pengelompokan inilah yang digunakan hingga saat ini dan beberapa jenis kawasan diatas sering disebut sebagai kawasan konservasi.<sup>2</sup>

Taman nasional secara khusus memiliki arti tersendiri bagi perlindungan kawasan konservasi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara. Konservasi melalui pendirian Taman Nasional dilahirkan pertama kali di Amerika, dimasa terjadinya pertempuran antara orang Indian dengan kolonisasi. Pendirian taman nasional *Yellowstone* sebenarnya merupakan kontroversi dan ironi bagi keberadaan suku Bannock, Sheepeater, Shoshone yang merupakan suku asli penghuni lembah *Yellowstone* yang subur. Dimana mereka harus terusir dari daratan mereka sendiri.

Ada lima hal yang menjadi dasar penetapan taman nasional saat itu ;

1. Menghindari adanya pemukiman dan aktifitas perdagangan
2. Menyediakan hiburan bagi masyarakat utamanya kaum kulit putih
3. Memelihara sumber-sumber daya alam dan situs-situs sejarah
4. Menghindari penggunaan komersialisasi terhadap sifat fisik alam

---

<sup>2</sup> Ibid hal 96-67

5. Mengelola dengan prinsip preservasi sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang.<sup>3</sup>

Dilihat dari aspek kepentingan pendirian Taman Nasional pertama pada dasarnya lebih banyak berbicara tentang kepentingan kaum kulit putih saat itu yang menginginkan tempat-tempat wisata yang indah "*pleasuring ground for white visitor*".<sup>4</sup> Karakteristik filosofis Taman Nasional yang mensyaratkan bebas pemukiman inilah, yang kemudian memang tidak cocok untuk diterapkan di banyak negara, terutama negara-negara selatan, karena setiap kawasan konservasi pada dasarnya merupakan kawasan hunian masyarakat adat selama beratus-ratus tahun. Selain itu logika preservasi yang dipakai dalam Taman Nasional memang bukan sesuatu yang bukan berkarakter negara-negara selatan, dimana masyarakat adat telah berhasil melestarikan alam selama ratusan tahun dengan logika konservasi versi mereka sendiri.

Di Indonesia sendiri gambaran problematik kawasan konservasi Taman Nasional tercermin dari banyaknya kasus-kasus agraria, pertentangan dengan masyarakat lokal dan kehancuran ekosistem di semua Taman Nasional. Sehingga memang banyak pihak yang menganggap penggunaan sistem konservasi berupa taman nasional sudah waktunya di hapuskan.

---

<sup>3</sup> **Ibid** hal 95

<sup>4</sup>Larry Lohman, **Ethnic Discrimination in "Global" Conservation**, Doc. Advokasi Working Group Conservation for People (WGCoP)

## **2. Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)**

Wacana Taman Nasional Gunung Merapi dimunculkan pertama kalinya oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada November 2001 yang kemudian disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah. Kemudian wacana tersebut berkembang dan disikapi secara positif oleh Departemen Kehutanan. Gubernur DIY kemudian memerintahkan Dinas Kehutanan Provinsi DIY melakukan proses penjaringan pendapat di masyarakat Sleman pada permulaan tahun 2002. Namun, bukannya dukungan dari masyarakat yang didapat tetapi adalah kecaman, sebab proses penjaringan pendapat tersebut diwarnai oleh banyak kekurangan dan manipulasi. Kekurangan tim penjaringan diantaranya adalah tidak mampu menjawab berbagai pertanyaan kritis masyarakat seputar apa dan mengapa taman nasional dan proses manipulasi dilakukan dengan menjadikan tanda kehadiran dari masyarakat sebagai bukti persetujuan akan didirikannya TNGM<sup>5</sup>

Kontroversi seputar wacana Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) semakin mengemuka setelah keluar Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No.134/MENHUT-II/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang mengalihfungsikan kawasan hutan di Gunung Merapi seluas 6.410 Ha menjadi Taman Nasional (TN).

Gelombang kecaman oleh masyarakat dan organisasi non-pemerintah (ornop) timbul dan semakin membesar yang berbuntut pada penolakan TNGM. Tercatat dua aksi besar menolak TNGM terjadi. Penolakan TNGM pada 5 Mei 2002 di Kaliurang yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Lokal Merapi (FMLM) ketika ada peninjauan lapangan oleh Menko Perekonomian dan Menteri negara

---

<sup>5</sup>Mimin Dwi Hartono, **Taman Nasional Mimpi Buruk Masyarakat Merapi**, Doc. Advokasi Yayasan Wanamandhira

Lingkungan Hidup yang disertai oleh Gubernur DIY. Aksi lebih besar terjadi pada Oktober 2002 yaitu pada saat Presiden Megawati hendak meresmikan TNGM di Boyolali. Aksi-aksi tersebut kemudian berdampak pada batalnya peresmian TNGM.

Semua aksi penolakan itu dimotori oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup). Sebuah forum ornop lingkungan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 1980. Lebih dari 300 ornop yang tergabung dalam walhi bekerja untuk mewujudkan transformasi sosial menuju tatanan yang demokratis guna terwujudnya kedaulatan rakyat atas pengelolaan lingkungan hidup. Kedaulatan rakyat merupakan kata kunci yang mendasi dasar perjuangan Walhi selama ini dan menanggapi kasus TNGM Walhi secara resmi menolak penetapan kawasan Merapi menjadi Taman Nasional.

Penolakan Walhi terhadap penetapan Merapi sebagai taman nasional ini didasarkan atas banyak pertimbangan. Dua pertimbangan khusus diantaranya adalah ; *pertama* disebabkan atas dasar pertanyaan efektifitas, karakteristik, maupun akses masyarakat terhadap kawasan taman nasional. Berdasarkan banyak fakta dilapangan, banyak kawasan yang ditetapkan sebagai taman nasional tetapi malah mengalami kerusakan lingkungan yang luar biasa sehingga tidak ada korelasi bahwa penetapan kawasan menjadi taman nasional akan menjadi jaminan terwujudnya kelestarian lingkungan. Fakta yang lain adalah karakteristik Taman Nasional itu sendiri yang ketat dan memiliki zonasi – zonasi tertentu yang membatasi akses masyarakat terhadap kawasan lindung sehingga banyak menyebabkan konflik agraria dengan masyarakat lokal. Di seluruh dunia terutama

di negara-negara selatan Taman Nasional telah menjadi arena pertentangan para pihak yang berkepentingan dengan sumber dayanya. Dalam banyak kasus pertentangan antara pihak pengelola yang biasanya di kelola oleh negara bekerjasama dengan agen konservasi internasional berhadapan dengan masyarakat adat. Konflik ini disebabkan karena pada dasarnya tidak ada satu kawasanpun di indonesia dan banyak negara selatan yang tidak memiliki hubungan ekonomi dan spiritual dengan masyarakat lokal sehingga penetapan kawasan menjadi Taman Nasional adalah menafikan keberadaan masyarakat lokal.

Yang *kedua* adalah pada persoalan administratif dari penjarangan aspirasi masyarakat dan proses sosialisasi yang dinilai menyesatkan dan manipulatif. Banyak warga masyarakat pada dasarnya tidak mengerti apa yang disebut Taman Nasional, lucunya warga mengira Taman Nasional adalah mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah dan Dunia Fantasi. Walhi mendapati kenyataan banyak sekali pemalsuan tanda tangan kehadiran warga pada saat proses sosialisasi yang dimanipulasi menjadi tanda tangan persetujuan Taman Nasional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Walhi bersama-sama perwakilan masyarakat di empat kabupaten yaitu ; Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten kemudian mengajukan Gugatan terhadap SK Menteri Kehutanan No. 134/MENHUT-II/2004 tertanggal 4 Mei 2004 tentang perubahan kawasan Merapi menjadi Taman Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta (PTUN), akan tetapi gugatan pertama ini mengalami penolakan oleh Majelis Hakim. Penolakan ini menurut Majelis Hakim didasarkan bahwa SK TNGM tersebut bersifat umum dan bukan individual. Kekalahan gugatan pada PTUN tidak

menyurutkan semangat Walhi dan warga merapi untuk kembali melakukan terobosan hukum. Banding ke putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung kemudian dilakukan dan prosesnya masih berjalan sampai sekarang.

Melihat keterbatasan sumber daya dan besarnya struktur negara yang harus dilawan Walhi kemudian melakukan strategi advokasi terintegrasi. Advokasi merupakan proses melakukan perubahan-perubahan di dua tingkatan atau dua struktur. *Supra-struktur* yaitu negara yang capaiannya adalah perubahan dalam sistem serta kebijakan dan *infra-struktur* yaitu masyarakat yang capaiannya adalah perubahan paradigma masyarakat serta pemahaman masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara. Advokasi juga sering dimaknai sebagai proses mencipta sebuah tatanan struktur kekuasaan baru. Dalam langkah-langkah advokasi biasanya tidak lepas strategi-strategi seperti ; *Comunity Organizing* (CO) atau pengorganisasian masyarakat, litigasi atau gugatan hukum pembelaan hak-hak korban, lobby politik, demonstrasi dan sebagainya.<sup>6</sup>

Strategi advokasi terintegrasi Walhi dilakukan dengan bekerja di tingkat basis yaitu melakukan transformasi informasi akan implikasi keberadaan Taman Nasional, di tingkatan nasional dengan melakukan gugatan hukum dan di tingkatan internasional dengan melibatkan aktor-aktor internasional untuk menekan pemerintahan Indonesia. Beberapa jaringan internasional Walhi seperti *Frends of The Earth(FoE)* Belanda, *Down to The Earth*, *Gobal for Justice*, IUCN (didalamnya Tilcepa) secara khusus di hubungi dengan email dan diminta

---

<sup>6</sup> Valerie Miller dan Jane Covey, **Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan dan Refleksi**, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, hal. 11-13



kesediaannya membantu menekan pemerintahan Indonesia untuk membatalkan penetapan kawasan Merapi sebagai Taman Nasional.

Usaha ini menghasilkan beberapa kesepakatan dengan beberapa jaringan internasional tersebut, jaringan seperti *Friends of The Earth, Down to The Earth, Global for Justice* membantu mengkampanyekan persoalan Taman Nasional Merapi dalam web-site mereka. Tilcepa (*Theme on indigenious and local Communities, Equity and Protected Area*) , WCPA (*World Commission on Protected Areas*) dan CEESP (*Commission on Equity, Economics and Social Policy*) IUCN's secara khusus membantu Walhi menekan pemerintahan Indonesia dengan menulis surat kepada presiden Soesilo Bambang Yodoyono dan semua instansi terkait untuk mempertimbangkan kembali penetapan Merapi sebagai taman nasional.

Tilcepa merupakan jaringan internasional inter-komisi dari *World Commission on Protected Areas (WCPA)* and *Commission on Environmental, Economic, and Social Policy (CEESP)* dari IUCN. Didirikan pada tahun 2000 dengan mandat tidak jauh berbeda dengan dua komisi tersebut yaitu untuk memberikan pengakuan secara penuh terhadap hak masyarakat lokal atas akses sumber daya alam kawasan lindung yang berada disekitar mereka. Diseluruh dunia banyak kawasan konservasi terutama Taman Nasional menjadi sebab pertentangan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang menjadikan terusirnya penduduk asli dari kawasan konservasi. Padahal secara turun-temurun tradisi kearifan lokal masyarakat adat telah mampu merawat alam dan keanekaragaman hayati selama beratus-ratus tahun.

Hubungan masyarakat adat dengan alam bukan hanya pada persoalan hubungan pola produksi tetapi lebih dari itu pola kedekatan masyarakat adat dengan alam berada pada titik hubungan spiritual yang memungkinkan mereka menjaga alam secara lestari.

Tilcepa bekerja mengadvokasi di seluruh negara dengan isu utama pengakuan hak-hak penduduk lokal dalam kawasan konservasi terutaman Taman Nasional. Beberapa aspek yang menjadi isu wilayah kerja Tilcepa yaitu : *New typology of governance of Protected Areas* (tipologi baru governance kawasan konservasi), *Community Conserved Areas (CCAs)*, *CCAs and sustainable livelihoods*, struktur kelembagaan manajemen kolaboratif kawasan konservasi, manajemen lansekap komunitas dan teritorial adat, konflik manusia dengan kehidupan liar, keadilan distribusi keuntungan kawasan konservasi, keuntungan non-material kawasan konservasi, masyarakat adat dan eko-wisata, perkembangan hukum kawasan konservasi dan kebijakannya, kebudayaan dan konservasi, gender dan kawasan konservasi dan lain-lain.

Di Indonesia Tilcepa secara khusus membantu Walhi dengan dukungannya terhadap advokasi pengakuan hak-hak masyarakat lokal disekitar lereng Merapi.

#### D. Rumusan Masalah

Dengan melihat uraian latar belakang masalah diatas maka penulis mengkhususkan permasalahan sebagai berikut **"Bagaimanakah peran Tilcepa dalam mendukung advokasi Walhi terhadap Taman Nasional Gunung Merapi ?"**

#### E. Kerangka Dasar Pemikiran

##### 1. Konsep Influence

**Konsep Influence**, konsep *influence* mengacu pada kemampuan secara langsung mengontrol atau menghasilkan efek tindakan atau pemikiran orang lain. Pemahaman ataupun pemaknaan konsep *influence* akan tergantung pada apa yang akan dipengaruhi dan apa tujuan dari pengaruh tersebut. Beberapa konsep yang berhubungan dengan konsep *influence* misalnya *social influence*, *sphere influence*, *power*, *lobby* dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

*Social influence* dipahami ketika pemikiran dan tindakan seseorang atau sekelompok masyarakat di rubah oleh seseorang atau sekelompok masyarakat lain. Contoh *social influence* misalnya tindakan-tindakan sosialisasi atau deseminasi, yang mana dari tindakan sosialisasi tersebut mampu merubah tingkah laku maupun cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Konsep *social influence* berhubungan erat dengan konsep *power* dimana pengaruh dapat diciptakan sesuai dengan keinginan orang yang mempengaruhi. *Social influence* sangat ditentukan oleh faktor-faktor sosial seseorang seperti kesuksesan dalam pekerjaan, jabatan,

---

<sup>7</sup> [www.wikipedia.com/concept&teory%20international%20relation/influence.htm](http://www.wikipedia.com/concept&teory%20international%20relation/influence.htm), Diakses 29 November 2006, 08: 45: 09

uang, ketampanan, faktor keturunan dan sebagainya. Besar kecilnya faktor tersebut akan mempengaruhi kekuatan seseorang dalam mempengaruhi ruang sosialnya.<sup>8</sup> Seorang artis misalnya dengan kepopulerannya di media dia mungkin akan lebih mampu mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sesuatu atau menyumbangkan sesuatu dari pada seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dikarenakan kekuatan media dan kepopulerannya telah membuat seorang artis tersebut memiliki *social influence* lebih besar dari pada seorang anggota DPRD.

Paling tidak ada tiga komponen dari *social influence* ;

pertama *Conformity* adalah sebuah tipe dari *social influence* dimana perubahan tingkah laku dan pandangan sekelompok orang sangat ditentukan oleh norma-norma sosial, kedua *Compliance* adalah sebuah bentuk *social influence* yang melibatkan permintaan langsung dari seseorang ke orang lain, ketiga *Obedience* adalah sebuah bentuk *social influence* dimana seseorang mematuhi permintaan langsung seseorang untuk melakukan sebuah tindakan.<sup>9</sup>

*Sphere influence*, dalam Kamus Hubungan Internasional Jack C Plano dan Ray Olton menjelaskan bahwa *sphere of influence* adalah wilayah yang didominasi oleh kepentingan nasional negara asing. Pada negara yang menjadi ruang pengaruh, negara asing tidak memiliki kedaulatan, namun mampu menekan suatu " paksaan mondial " (*internasional servitude*) terhadap negara tersebut sehingga membatasi kebebasannya. Penguasaan pengaruh seperti ini dapat berakibat positif manakala negara dominan mengakui monopoli pengelolaan

---

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

bidang komersial negara yang dijadikan ruang pengaruh, atau berakibat negatif bagi negara yang lebih lemah karena dituntut untuk mengurangi atau menghilangkan garis perbatasan negaranya. Perubahan fenomena dan pola interaksi dalam hubungan internasional memungkinkan aktor-aktor di luar negara memiliki *sphere influence* yang besar. Bahkan sering kali aktor-aktor seperti Perusahaan Transnasional, asosiasi-asosiasi internasional ataupun NGOs (Non Government Organisation) mampu mengendalikan negara.

*Power* sebagai pengaruh, ilmuwan politik secara prinsip menggunakan konsep *power* dalam konteks kemampuan aktor untuk menggunakan pengaruhnya atas aktor lain dalam sistem internasional. Pengaruh ini dapat berupa *coercive*, *attractive*, *cooperative*, dan *competitive*. Cara-cara penggunaan *influence* biasanya dilakukan dalam teknik-teknik diplomasi, bantuan-bantuan ekonomi, *force*, pertukaran kebudayaan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Dalam kerangka berfikir konsep *influence* ini Walhi berusaha merubah kebijakan pemerintahan Indonesia terhadap penetapan kawasan Merapi menjadi Taman Nasional dengan meminta Tilcepa mempengaruhi pemerintahan Indonesia untuk merubah kebijakannya.

## 2. Teori Peranan

Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.<sup>11</sup> Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki itu, diharapkan berperilaku sesuai

---

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 44.

dengan sifat posisi itu.<sup>12</sup> Teori peranan memaparkan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan dari atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki pola perilaku tertentu pula. Harapan dan atau dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peranan sehingga peranan aktor sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul.

Menurut John Wahlke, teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik.<sup>13</sup> *Pertama*, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Kerangka berpikir Teori Peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. *Kedua*, teori ini mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara *behavioral*. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai tujuan.

Menurut Alan Isaak<sup>14</sup>, harapan terhadap individu yang menduduki posisi itu bisa muncul dari dua jenis sumber. *Pertama*, itu bisa berasal dari harapan yang dipunyai orang lain terhadap aktor politik namun harapan itu tidak hanya dari orang lain, ia juga bisa datang dari diri aktor politik itu sendiri. Aktor itu sendiri mungkin punya persepsi tentang apa yang diharapkan orang lain dari dirinya. Oleh karena itu jenis sumber pengaruh pertama yang disebut dalam peran

---

<sup>12</sup> Mochtar Mas'ood, *loc cit*

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 45.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 45-46.

adalah hubungan antara harapan orang lain terhadap pemegang peran dengan persepsi pemegang peran terhadap harapan tersebut. *Kedua*, harapan itu bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapan sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Harapan yang berasal dari dalam ini biasanya akan menjadi gagasan bagi sang aktor. Sebagian besar gagasan ini biasanya mencerminkan sikap, ideologi, dan kepribadian yang dikembangkan sebelum memegang peranan yang dimainkan. Tapi gagasan ini tentu akan dipengaruhi oleh harapan orang lain tadi. Artinya, si pemegang peranan itu bukan hanya sadar mempertimbangkan harapan orang lain terhadap perannya, tetapi harapan orang luar itu juga mempengaruhi cara dia menafsirkan peranan yang dipegangnya.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori di atas, maka penulis mengambil hipotesa bahwa ; **“TILCEPA berperan memberikan bantuan terhadap advokasi WALHI atas Taman Nasional Gunung Merapi secara aktif”**.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar objek penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan

ditegaskannya batas-batas kajian, maka otomatis akan menjadi pedoman dan mencegah timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan<sup>15</sup>.

Pembatasan penelitian juga memudahkan penulis dalam mencari data-data yang dibutuhkan. Dalam menulis skripsi ini penulis membatasi waktu penelitian antara tahun 2001-2006. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa isu penetapan kawasan Merapi menjadi Taman Nasional berkembang antara tahun tersebut. Demikian juga strategi Walhi melibatkan Tilcepa dalam proses advokasi Taman Nasional Gunung Merapi terjadi pada dua tahun terakhir periode tersebut dan dukungan advokasi yang diberikan Tilcepa kepada Walhi sampai sekarang masih berlangsung hingga skripsi ini diselesaikan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data-data yang dipakai dalam tulisan ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Pengambilan data dilakukan di tempat yang relevan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data penulisan ini meliputi data kepustakaan dan pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari beberapa ornop (Organisasi Non-Pemerintah) dan Aktifis Ornop.

Data kepustakaan diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Walhi Yogyakarta
- b) Perpustakaan Eksekutif Nasional Walhi Jakarta
- c) Perpustakaan Yayasan Kappala Indonesia

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi-*Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 87



- d) Perpustakaan Rudi Gustave ( Koordinator WGCOP )
- e) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- f) Media Internet
- g) Surat Kabar dan Majalah

Pengumpulan data lapangan diperoleh dari :

- a) Dokumen advokasi Walhi Jogjakarta
- b) Dokumen advokasi Walhi Eksekutif Nasional Jakarta
- c) Dokumen advokasi Yayasan Kappala Indonesia
- d) Dokumen advokasi Yayasan Wanamandira
- e) Dokumen advokasi Working Group Conservation for People (WGCOP)
- f) Makalah Lokakarya Multipihak

## **2. Teknis Analisis.**

Dalam menganalisis persoalan ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif eksplanatoris, yaitu mendeskripsikan secara objektif fakta dan datanya, serta memberikan penjelasan hubungan antar variable, berdasar teori dan fakta yang dijadikan dasar analisis kemudian diinterpretasikan sehingga sampai pada kesimpulan akhir dari penelitian.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Skripsi ini akan terbagi menjadi bab antara lain:

Bab I : Latar belakang menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi persoalan. Kemudian rumusan masalah, dilanjutkan dengan kerangka dasar pemikiran yang menguraikan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II : Membahas tentang Taman Nasional Gunung Merapi ; Letak geografis, Topografi, Sejarah konservasi Merapi, Proses menjadi Taman Nasional, Titik awal konflik TNGM, Kebudayaan konservasi masyarakat merapi dan Ancaman implikasi penetapan TNGM.

Bab III : Memberikan gambaran tentang TILCEPA (*Theme on Indegenious and local Communities, Equity and Protected Area*) dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Bab IV : Membahas mengenai peranan TILCEPA (*Theme on Indegenious and local Communities, Equity and Protected Area*) dalam membantu Walhi dalam advokasi Taman Nasional Gunung Merapi, Proses Advokasi Walhi, Proses Masuknya Tilcepa dan Pengaruh yang dijalankan Tilcepa terhadap penetapan Taman Nasional Gunung Merapi.

Bab V : Kesimpulan